



Bupati Gde Agung Tinjau Proyek Fisik

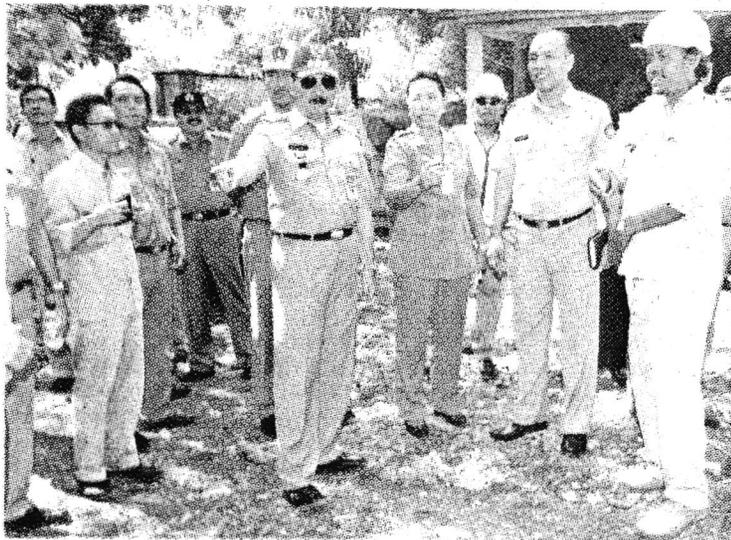
2016, Badung Selatan Diharapkan Sudah Dapat Air Bersih

BUPATI Badung A.A. Gde Agung bersama Wakil Bupati Badung I Made Suidiana, Sekda Badung Kompyang R. Swandika beserta pimpinan SKPD terkait, Rabu (15/4) kemarin melaksanakan kunjungan kerja guna meninjau kegiatan-kegiatan APBD triwulan I tahun anggaran 2015. Ada sejumlah proyek fisik yang ditinjau, meliputi pembangunan gedung koperasi di areal Puspem Badung, Kantor Camat Mengwi, Gedung E RSUD Badung, Kantor PMI dan KPAD di Abianbase, SPAM Penet Unit Distribusi Badung dan Denpasar, penataan taman *telajakan* dan median jalan Simpang Dewa Ruci, pembangunan *Long Storage* Tukad Mati, dan penambahan sarana infrastruktur air bersih di Badung Selatan.

Bupati Gde Agung saat jumpa pers dengan awak media menekankan bahwa kunjungan triwulan pertama ini sebagai evaluasi secara langsung kegiatan fisik di lapangan. Proyek yang ditinjau merupakan proyek strategis yang langsung memberikan pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan,

harkat, martabat masyarakat, seperti Gedung E RSUD Badung maupun SPAM Penet. Proyek rumah sakit (RS) ini merupakan proyek tahun jamak dan saat ini

telah berjalan baik. Bangunan Gedung Blok E tersebut difungsikan untuk VIP, super VVIP dan standar. "Untuk memenuhi standar pelayanan tersebut, kita dituntut



KUNKER - Bupati Badung A.A. Gde Agung bersama Wakil Bupati Badung I Made Suidiana saat kunjungan kerja (*kunker*) meninjau kegiatan-kegiatan APBD triwulan I tahun anggaran 2015, Rabu (15/4) kemarin.



Sambungan.

untuk memberikan pelayanan medis yang bertaraf internasional. Oleh karena itu, kita menyiapkan ruangan, tenaga medis (SDM) termasuk menyiapkan UGD, peralatan dan syarat lingkungan," jelasnya.

Untuk pelayanan air bersih Tukad Penet, telah berjalan dengan baik melalui dana pusat. Sementara saluran/pipa dibangun dari dana APBD Provinsi yang konek dengan APBD Kabupaten Badung. Pembangunan SPAM ini untuk memenuhi kebutuhan air di Badung Selatan. "Proyek *multi years* tersebut belum sepenuhnya selesai, masih terjadi kendala pada pemasangan jaringan pipa yang dilaksanakan APBD Provinsi. Nanti setelah selesai akan menghasilkan 300 liter per detik, di mana Badung memanfaatkan 150 liter untuk selatan," jelasnya.

Selain itu, juga ditinjau pembangunan instalasi air bersih di Tegeh Sari. Diharapkan, melalui proyek air bersih ini, pada bulan April 2016 Badung Selatan sudah dapat dialiri air bersih. Selain kedua proyek tersebut, pihaknya

juga meninjau pembangunan gedung pelayanan yaitu gedung koperasi dan UKM yang akan dilengkapi stan koperasi serba usaha maupun simpan pinjam. Selain itu, pembangunan Kantor Camat Mengwi yang memanfaatkan eks BPP Pertanian Mengwi dengan status tanah hibah dari provinsi kepada Badung.

Pembangunan Kantor Camat Mengwi ini akan dilengkapi tiga bangunan, yaitu pelayanan, kantor camat dan pura serta parkir. Sementara tanah kantor camat yang dulu merupakan tanah Desa Adat Mengwi, akan dimanfaatkan menjadi kawasan hijau dan lahan parkir objek wisata Taman Ayun, sehingga tidak ada parkir lagi di depan patung Bima Sakti *bencingah* Puri Ageng Mengwi. Bupati juga menginginkan, ke depan Badung akan memiliki taman kota, semacam alun-alun penuh dengan penghijauan sehingga masyarakat bisa bermain. Juga, diinginkan ada sebuah gedung kesenian yang diberi nama "Graha Mangupura". (ad1281)

Hal. 2

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 2



Diduga Proyek Siluman

Dewan Pertanyakan

Anggaran

Pembangunan

Kantor PU

Amlapura (Bali Post) -

Sejumlah anggota dewan mempertanyakan munculnya proyek pengadaan gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karangasem. Terlebih, proyek ini menyedot anggaran yang cukup besar yakni Rp 2,1 miliar. Padahal, proyek gedung kantor berlantai tiga tersebut sama sekali belum pernah dibahas pihak eksekutif bersama anggota DPRD Karangasem. Dewan pun menuding, proyek yang menggunakan DAK tersebut menjadi proyek siluman yang sengaja ditutup-tutupi.

Wakil Ketua Badan Anggaran, I Nyoman Karya Kartika, mengungkapkan pihaknya sama sekali belum pernah membahas atau pun mendapatkan pemberitahuan terkait proyek miliaran rupiah untuk pembangunan gedung Kantor PU tersebut dari pihak eksekutif. "Anggaran DAK itu tidak langsung dikomunikasikan ke kita. Tidak pernah dibahas," tuturnya saat dihubungi Rabu (15/4)

kemarin.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karangasem, I Gede Dana, menuturkan, proyek yang kini sedang masa proses tender tersebut tidak pernah disampaikan pihak eksekutif. Tiba-tiba muncul begitu saja tender gedung kantor yang memiliki nilai miliaran rupiah tersebut. "Tidak melalui pembahasan, sehingga ini proyek siluman. Nanti coba

saya cek apa sengaja ditutup-tutupi," katanya.

Dikonfirmasi mengenai pembangunan gedung kantor ini, Kadis PU Kabupaten Karangasem I Nyoman Sutirayasa yang didampingi Kabid Tata Ruang Bangun-bangunan dan Perumahan Dinas PU Karangasem I Made Agus Budiayasa mengungkapkan, konstruksi gedung kantor baru Dinas PU tersebut disebabkan karena kantor lama sudah



Sambungan.

tidak muat untuk bekerja.

Pihaknya menjelaskan, dulunya gedung Kantor PU saat ini dimiliki pemerintahan provinsi yang digunakan sebagai *workshop*. Akibatnya, model bangunan yang seperti bengkel tersebut kurang representatif untuk pelaksanaan pekerjaan. Pasalnya, kantor yang ditempati saat ini masih berukuran kecil. "Yang ditempati saat ini masih berukuran kecil sekali tidak muat untuk bekerja," jelasnya.

Terkait dengan proses penganggaran dan tender yang tiba-tiba muncul, Agus Budi'asa mengatakan proyek tersebut sebenarnya sudah lama diajukan. Hanya, pihaknya tidak tahu pasti kapan mulai diajukan. Ang-

garan proyek Rp 2,1 miliar ini menggunakan dana APBD induk 2015 yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Rencananya, dana Rp 2,1 miliar tersebut akan digunakan untuk membuat gedung tingkat tiga. Gedung yang akan dibangun di selatan Kantor Dinas PU saat ini akan memiliki ukuran sekitar 767 meter persegi. Di lantai satu akan digunakan sebagai *basement*, tempat parkir pegawai, lantai II akan diperuntukkan sebagai kantor Tata Ruang Bangun-bangunan dan Perumahan dan lantai III untuk Bidang Sumber Daya Air. (dwa)



Dugaan Gratifikasi Mantan Bupati Klungkung

*Candra Harus Buktikan
Sumber Kekayaan Rp 60 Miliar*

Denpasar (Bali Post) -

Mantan Bupati Klungkung Wayan Candra kembali dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (15/4) kemarin. Jaksa penuntut umum (JPU) Made Pasek dkk. menghadirkan ahli dari Universitas Brawijaya, Malang, Adami Chazawi, guna membuktikan dakwaan gratifikasi yang dialamatkan pada mantan Bupati Klungkung dua periode itu.

Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Hasoloan Sianturi itu, saat pemeriksaan ahli, sempat diskor. Pasalnya, anggota majelis hakim atau hakim adhoc Hartono "semaput" dan dia harus keluar persidangan. Karena sakit, hakim adhoc itu diganti temannya, Guntur. "Sejak awal memang sudah kelihatan sakit, karena Pak Hartono mengeluarkan keringat. Sidang akhirnya diskors untuk dicarikan hakim pengganti," ujar Sianturi.

Sementara ahli Adami Chazawi dalam keterangannya mengatakan jika terdakwa bisa membuktikan sumber hartanya, dakwaan jaksa terkait gratifikasi yang mencapai Rp 60 miliar bisa gugur. Dosen di Universitas Brawijaya itu menam-

bahkan, dalam kasus gratifikasi diberlakukan pembuktian terbalik. Dugaan gratifikasi tidak perlu dibuktikan oleh jaksa, namun wajib dibuktikan oleh terdakwa. "Ini bisa dilihat dalam kasus Gayus Tambunan," katanya sembari mencontohkan, Gayus didakwa dalam kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara dari 10 sumber harta yang diduga berkaitan dengan gratifikasi, jaksa hanya mampu membuktikan 5 dari 10 harta tersebut. Namun dalam putusannya nanti, majelis hakim menganggap lima harta lainnya yang tidak bisa dibuktikan tetap merupakan hasil korupsi. "Ini karena terdakwa tidak bisa membuktikan asal-muasal harta tersebut," tegasnya.

Menanggapi keterangan ahli, kuasa hukum terdakwa, Suryaatin Lijaya dan Warsa T. Bhuwana, yang ditemui usai sidang mengatakan siap melakukan pembuktian terkait harta kliennya yang disebut sebagai hasil gratifikasi. "Kami akan beber bukti-bukti kalau harta tersebut bukan didapat dari hasil gratifikasi," katanya. (kmb37)

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 3



Giliran Kantor Bupati Badung "Diobok-obok" Kejari Denpasar

Denpasar (Bali Post) -

Menghindari kesan tebang pilih, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar rupanya tidak hanya "mengobok-obok" Pemkot Denpasar. Namun kini, petugas Kejari Denpasar juga nyelinap di Kantor Bupati Badung atau Puspem Badung di Sempidi. Bahkan, kantor yang dipimpin Bupati A.A. Gde Agung itu sudah disanggongi guna menguak sejumlah dugaan penyimpangan, khususnya soal tirtayatra. "Masih konsentrasi di Dinas Kebudayaan. Di sini ada informasi penyimpangan," ujar sumber kejaksaan.

Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir yang dimintai konfirmasi wartawan mengaku sudah mendapatkan perintah khusus untuk segera bergerak terkait kasus dugaan korupsi di Pemkab Badung. Utamanya, kasus tirtayatra. Selama ini ada data masuk kasus dugaan penyimpangan di Inspektorat, terkait urusan dana tirtayatra ke Gunung Salak. Selain kasus ini, muncul lagi kasus dugaan penyimpangan di Dinas Kebudayaan. "Intinya, kami sudah garap. Kami akan bekerja dan bekerja. Untuk dugaan-dugaan kasus korupsi di Badung, kali ini data baru masuk terkait kasus korupsi tirtayatra ke India," jelasnya.

Dia mengatakan, informasi sementara atas kasus ini menggunakan dana sekitar Rp 900 juta lebih sampai Rp 1 miliar. "Angkanya Rp 900 juta lebih, kami masih dalam. Semoga nanti bisa kami segera mendapatkan data atas penyimpangan ini," tegasnya.

Untuk di Pemkot Denpasar, dia mengatakan terus dikembangkan. Saat ini data yang sudah dikumpulkan mencapai empat kardus.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar Emanuel Zebua mengaku sudah membentuk tim guna menguak terjadinya penyimpangan di Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung. "Tim ini tidak hanya dari pidsus, namun juga dari intel, termasuk pidum. Jaksa siapa saja bisa melakukan penyidikan korupsi kan?" katanya yang saat itu ditemani Kasipidum Kejari Denpasar Ketut Agung.

Dia berharap, dalam mengungkap korupsi ini ada pihak yang memberikan data, termasuk wartawan dan LSM. (kmb37)

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 3



Implikasi Penerapan UU Pemerintahan Daerah Pengelolaan SMA/SMK di Badung Diserahkan ke Pemprov

Mangupura (Bali Post) -

Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ternyata berimplikasi terhadap pengelolaan SMA/SMK di Badung. Pasalnya, setelah pusat mengambil alih pengelolaan Terminal Mengwi, UU tentang Pemerintah Daerah juga mengamanatkan agar pengelolaan SMA/SMK diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Kenyataan ini dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung I Ketut Widya Astika yang dimintai konfirmasi, Rabu (15/4) kemarin.

Bahkan berdasarkan aturan, katanya, pengelolaan SMA/SMK harus diserahkan ke Pemprov Bali selambat-lambatnya Oktober 2016. "Saat ini kami sedang melakukan pendataan bersama instansi terkait. Paling lambat harus sudah dilaksanakan Oktober 2016," ujarnya.

Menurutnya, terdapat 40 SMK/SMA di Badung, terdiri dari 8 SMA negeri, 19 SMA swasta, dan 2 SMK negeri, 11 SMK swasta. Dana APBD yang dikucurkan untuk penyelenggaraan belajar-mengajar (BOS APBD) SMA/SMK negeri per tahunnya sekitar Rp 10,4 miliar, sedangkan swasta Rp 19 miliar. "APBD Badung yang dikucurkan tiap tahunnya sangat besar. Belum lagi untuk kesejahteraan guru, juga ada dialokasikan dari APBD," sebutnya.

Kondisi tersebut, membuat Bupati Badung A.A. Gde Agung khawatir. Sebab, kabupaten dengan PAD tertinggi itu memiliki SMK Pertanian di Petang yang dibangun mulai dari nol dan kini peminatnya makin banyak. Terdapat ada 300 siswa di sekolah yang berlokasi di

Desa Pelaga tersebut. "Kami cukup khawatir dengan SMK Pertanian Petang yang kami asuh sejak bayi. Kami juga khawatir dengan SMA dan SMK swasta yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi SDM untuk pariwisata," katanya.

Pihaknya kini tengah mendata aset-aset sekolah yang ada di Badung sebelum diserahkan ke Pemprov Bali. "Saat ini Pak Sekda sedang melakukan pendataan

aset-aset sekolah, sebelum nanti diserahkan ke provinsi," jelasnya.

Bupati Badung juga khawatir lantaran selama ini SMA/SMK swasta juga mendapatkan bantuan dana BOS dari APBD Badung, termasuk untuk gaji para gurunya. "Apakah nanti setelah dikelola provinsi, mereka (SMA/SMK) swasta akan mendapatkan dana APBD? Sebab, bantuan itu sangat berpengaruh pada eksistensi sekolah," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Badung I Wayan Weda Dharmaja menyebutkan, wacana penarikan Terminal Mengwi sudah dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekda Badung, belum lama ini. Rapat khusus membahas UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, di mana salah satunya menyebutkan terminal tipe A akan dikelola pemerintah pusat. "Kami di Badung sudah rapat dengan Pak Sekda untuk membahas masalah ini (UU 23/2014 - red)," ucapnya.

Selain membahas pengalihan Terminal Mengwi, dalam rapat tersebut juga membahas masalah aset Badung yang ada di Terminal Mengwi yang menyangkut masalah P3D (Personal, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen). "Saat ini kami sedang mendata aset-aset Badung yang ada di Terminal Mengwi," ujarnya. (kmb27)

Edisi : Kamis, 16 April 2015.

Hal : 2



Rapat DPD Soal Reklamasi Teluk Benoa (1)

Jangan Perlakukan Investor sebagai Dewa Penyelamat

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD)-RI meminta pemrakarsa bersikap jujur tentang rencana reklamasi Teluk Benoa. Sebab, slogan membangun orang Bali dengan merevitalisasi Teluk Benoa melalui reklamasi dinilai masih jauh dari cara berpikir orang Bali dan ajaran Tri Hitna Karana.

Pandangan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komite II DPD dengan semua pihak yang terlibat di dalam rencana reklamasi Teluk Benoa di ruang rapat Komite II DPD, di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (15/4) kemarin. Rapat dipimpin Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba. Hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian KLH Imam Hendargo Abu Ismoyo, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sudirman Saad, delapan perwakilan dari ForBALI dipimpin Wayan "Gendo" Suardana antara lain Walhi Bali, bendesa adat

dan pemuda serta Direktur Umum PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) Heru B Wasesa beserta rombongan.

Permintaan semua pihak mengikuti cara berpikir orang Bali disampaikan anggota Komite I DPD-RI I Gede Pasek Suardika. Meski bukan anggota Komite II DPD, Suardika dan dua anggota DPD lainnya dari komite berbeda dari dapil Bali, diberi kekhususan mengikuti pembahasan yang khusus mengagendakan pembahasan rencana reklamasi Teluk Benoa. "Karena pembahasan ini penting dan telah menjadi isu nasional, kami mengajak semua anggota DPD dari Bali untuk mengikuti rapat kali ini," kata Wakil Ketua Komite II DPD I Kadek Arimbawa.

Hal. 23
Tim Kajian



Pasek Suardika



Sambungan.

Tim Kajian

Dari Hal. 1

Dalam rapat tersebut, Pasek Suardika mementahkan semua penjelasan yang disampaikan pihak TWBI yang menyertakan tim kajiannya dari sejumlah akademisi. Ia juga mengkritik penjelasan dari pihak KLH dan KKP. "Kalau pendekatannya Tri Hita Karana, masih jauh sekali. Orang Bali enggak perlu Benoa direklamasi. Dulu Pulau Serangan juga dijanjikan seperti itu, tetapi nyatanya saat ini pantai dari Gianyar sampai Karangasem rusak. Lalu yang bertanggung jawab mengeluarkan izin itu sekarang ke mana? Kami sudah tidak tahu ke mana. Jangan (investor) diperlakukan sebagai dewa untuk memperbaiki Bali," kata Pasek Suardika.

Mengenai paparan analisis dan data tim kajian dari TWBI, Pasek Suardika mengatakan reklamasi tidak bisa dilakukan melalui pendekatan teori modern, tetapi pemerintah dan TWBI diminta juga cara pandang orang Bali dalam memahami lingkungannya. Ada pendekatan cara berpikir orang Bali yang tidak bisa dipahami dengan cara berpikir tadi (kajian tim TWBI). Oleh karena itu, saya jadi mempertanyakan niat investor itu sebenarnya apa: revitalisasi atau reklamasi," katanya.

Kalau memang mau merevitalisasi hutan mangrove saja, menurutnya, sebenarnya anggaran dari APBN saja sudah cukup. "Kalau mau mereklamasi maka investor harus jujur, bahwa ini memang untuk reklamasi bukan revitalisasi. "Dengan reklamasi investor akan mengeluarkan jauh lebih sedikit. Bayangkan harga tanah di sekitar kawasan itu paling murah Rp 2 miliar per are (100 m²). Satu hektar sama dengan 100 are. Jadi kalau ada 700

hektar maka nilai jualnya Rp 80 triliun. Ini juga jangan ditutup-tutupi," katanya.

Pasek Suardika juga memaparkan dari hitung-hitungan rekannya, nilai investasi reklamasi Teluk Benoa hanya senilai Rp 15 triliun, atau setengah dari nilai yang diumumkan pihak TWBI senilai Rp 30 triliun. "Menurut investor Rp 30 triliun. Oke kalau kita pakai senilai itu, berarti untungnya sudah Rp 50 triliun untuk investor. Keuntungan pun masih sangat besar meskipun masih dipotong untuk sumbangan ke negara yang katanya sebesar Rp 3 triliun. Lalu untuk orang Bali sendiri berapa? Jadi, saya minta untuk dibuka semua secara jelas dan transparan," tegasnya.

Pasek Suardika juga menyemprot para pembuat kebijakan yang menurutnya perlu berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah aturan. "Sebab, kejahatan paling berbahaya itu sebenarnya adalah kejahatan mengubah aturan. Buat aturan dulu, lalu pengembangannya menyesuaikan aturan yang dibuat. Ini buat kami orang Bali menjadi masalah serius. Dan bahkan, masyarakat internasional seperti di Amerika Serikat juga mulai melakukan aksi demo penolakan. Itu dilakukan karena mereka mencintai Bali," ungkapnya.

Dia juga membantah hasil kajian TWBI dari sisi geoteknik. Menurutnya, secara geopolitik, sejak dulu orang Bali memiliki falsafah bahwa ada gugusan spiritual dimulai dari lereng Gunung Agung berupa Pura Besakih, hingga ke Tanjung Benoa yang semuanya merupakan satu-kesatuan. Semua gugusan itu tidak boleh dirusak dan harus dijaga kelestariannya. "Ini gugusan yang selama ini menjaga kerukunan Bali. Kalau cara berpikir itu tidak dimasukkan, sulit.

Jadi mohon maaf, memang ini harus ditolak, kalau kami mengikuti cara berpikir leluhur kami," katanya.

Terkait izin lokasi yang sudah dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan di era Menteri Syarif Cicip Sutardjo, Suardika meminta agar semua salinan sebelum izin lokasi diberikan dibuka kembali. "Ini penting untuk mengetahui apakah surat-surat yang digunakan sebagai rujukan itu valid. Karena seperti sekarang ini, sudah menandatangani, ternyata mengaku tidak membacanya," kelakar Suardika tanpa menyebut kasus keluarnya perpres kenaikan DP mobil pejabat negara yang belakangan diakui Presiden Joko Widodo tidak dibacanya.

Sementara kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, juga meminta agar diberi ruang luas. "Karena kalau saya cermati penjelasan dari KLH tadi, kok bahasanya tidak ada yang menolak. Tetapi, ternyata di sini ada yang menolak. Bahasa yang menolak kok enggak masuk, tetapi bahasanya belum disempurnakan. Sepertinya diapresiasi, tetapi penolakan masyarakat harus disempurnakan," kritiknya.

Anggota DPD dari Nusa Tenggara Barat Lalu Suhaimi mengakui Bali dikenal dunia karena memiliki kekhasan, baik seni, budaya dan alamnya. "Oleh karena itu, kalau mau mengubah merevitalisasi maupun mereklamasi, harus hati-hati," ingatnya.

Selain itu, dari sisi lingkungannya. Suhaimi mengatakan wilayah NTB yang diebut-sebut akan menjadi lahan sumber material reklamasi juga harus diperhatikan kelangsungan alamnya. "Sebab, Bupati Lombok Timur ingin pasir di wilayahnya diambil, tetapi Gubernur NTB justru menolaknya," katanya. (kmb4)

Hal. 2

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 1 dan 23



Jokowi Tanya Soal Baliho Tolak Reklamasi

Jerinx SID "Lapor" ke Istana

Denpasar (Bali Post) -

Presiden Jokowi rupanya belum mendapat informasi yang valid tentang rencana reklamasi Teluk Benoa. Buktinya, kepada drummer band Superman Is Dead (SID), I Gede Ari Astina (Jerinx), Jokowi bertanya soal maraknya baliho tolak reklamasi Teluk Benoa di Bali. Jokowi juga rupanya belum tahu siapa pengusaha megaprojek yang akan me-*ngurug* laut 700 hektar tersebut.

Dihubungi, Rabu (15/4) kemarin, Jerinx menyatakan telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin. Jerinx memenuhi undangan Tim Relawan Jokowi untuk memberi masukan sekaligus mendengarkan program ke depan Presiden. Kesempatan ini pun tidak

disia-siakan Jerinx untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

"Saya tadi (kemarin - red) bertemu Jokowi, agenda saya cuma satu agar Jokowi membatalkan Perpres 51 Tahun 2014 yang juga akan secara otomatis membatalkan rencana rekla-

masi Teluk Benoa. Itu saja yang saya sampaikan," ujarnya dikonfirmasi via telepon. Jerinx menambahkan, atas "tuntutan" untuk membatalkan Perpres 51/2014, Jokowi hanya mengangguk-angguk.

Hal. 23

Memberi Jawaban



Bali Post/ant

PEKERJA SENI - Kelompok pekerja seni, industri kreatif, aktivis lingkungan serta musisi usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/4) kemarin. Pertemuan itu menyerap aspirasi dari para aktivis dalam bidang lingkungan hidup, seni dan budaya.

Hal. 1.

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 1 dan 23



Sambungan.

Memberi Jawaban

Dari Hal. 1

Sepertinya kurang mempelajari lagi kasus reklamasi Teluk Benoa. Oleh karena itu, lanjut Jerinx, Jokowi belum bisa memberi jawaban antara akan membatalkan perpres atau tidak. Namun, Jokowi sempat menanyakan siapa investor dari megaprojek tersebut. Selain itu juga menanyakan kenapa ada banyak baliho tolak reklamasi di Pulau Dewata.

"Terus yang ketiga beliau meminta data tentang kasus ini. Dia ingin pelajari dan saya juga jelaskan sejumlah komponen di Bali sudah 2,5 tahun berjuang menolak reklamasi dan kami sudah mulai frustrasi. Kami benar-benar menunggu sikap tegas Jokowi karena rakyat sudah mendesak menolak. Yang setuju hanya sebagian dari elite politik saja," lanjutnya.

Jerinx melanjutkan, Jokowi mungkin bisa mengambil keputusan setelah mendapat data dan mempelajarinya. Mengingat Jokowi, dikatakannya, tidak tahu kalau penolakan reklamasi sudah berlangsung lama. Terpenting, Jokowi sudah mendapat banyak penjelasan darinya. Salah satunya bahwa kawasan yang mau di-urug itu adalah kawasan yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

"Di negara ini kan banyak

sekali problem, jadi harus sabar juga karena dia juga punya skala prioritas yang lain. Mungkin ada hal yang dianggap lebih urgen untuk diselesaikan dulu satu-satu. Berharap yang terbaik saja, soalnya dari sikap-sikap beliau, dari semua hal yang dikatakan tadi sepertinya dia paham proyek ini bikin ribet masyarakat," tandas pria yang menjadi Tim Relawan Jokowi menciptakan perubahan dari sosial media ini.

Seperti diketahui, sejak muncul SK Gubernur (sudah dicabut) yang memberi izin pemanfaatan Teluk Benoa, banyak komponen masyarakat yang melakukan aksi demo. Tak hanya di jalan-jalan, mereka juga menggelar aksi di tengah laut.

Mereka terdiri atas banyak komponen: seniman, pemuda, akademisi, mahasiswa, pengusaha dan sekaa teruna-teruni. Selain menggelar aksi, mereka juga kerap berdialog dengan anggota DPRD untuk menyuarakan penolakan terhadap proyek yang dinilai akan mengancam alam Bali.

Selain demo dan dialog, mereka juga memasang baliho hampir di seluruh desa di Bali. Sebab, mereka khawatir reklamasi ini akan berdampak pada kehidupan sosial, budaya, lingkungan dan agama di Bali. (kmb32)

Hal-2

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 1 dan 23



Perluas Areal Parkir Kontraktor Diminta Bongkar Pembatas Taman RSUD Badung

Mangupura (Bali Post) -

Areal parkir di RSUD Badung akan diperluas, utamanya untuk kendaraan roda empat. Guna keperluan itu, pihak kontraktor diminta membongkar pembatas taman yang berada di sebelah timur gedung utama rumah sakit milik Pemkab Badung tersebut. "Ini (pembatas taman - red) dibongkar supaya parkirnya lebih luas, jadi mobil bisa parkir di dua sisi jalan. Selain itu, kendaraan yang melintas juga tidak terganggu," ujar Bupati Badung A.A. Gde Agung saat meninjau proyek perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Badung bersama sejumlah SKPD, Rabu (15/4) kemarin.

Menurutnya, keberadaan taman di depan Gedung E yang sedang dalam proses *finishing* itu terlalu banyak memanfaatkan ruang yang ada, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan pengunjung. "Tamannya dikecilkan saja supaya parkirnya luas, sehingga yang ke sini tidak terganggu," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Badung juga meninjau proyek pembangunan Gedung E yang menghabiskan anggaran Rp 76 miliar. Proyek dikerjakan oleh PT Waskita Karya selama 390 hari, diproyeksikan un-

tuk melayani pasien kalangan atas. "Khusus di Gedung E kamar yang dipersiapkan klasifikasi VIP dan VVIP," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam mewujudkan pelayanan untuk kelas *very important person* (VIP) dan *very very important person* (VVIP), pihak rumah sakit akan memberikan pelayanan spesial kepada pasiennya. Bahkan, digadang-gadang tidak kalah dengan pelayanan rumah sakit yang ada di Jakarta maupun Singapura. Sedangkan khusus untuk masyarakat biasa yang memerlukan pelayanan maksimal dengan biaya ringan, pihak rumah sakit sudah menyiapkan rawat inap di Gedung B dan C. Gedung ini baru saja selesai dibangun akhir tahun lalu.

Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Badung Ni Putu Dessy Darmayanti menyatakan, proyek tersebut direncanakan kelar pada 6 Agustus 2015 mendatang. Namun, pihaknya berharap proyek bisa tuntas sebelum tanggal yang telah ditentukan, mengingat bertepatan dengan libur Lebaran. "Secara prinsip tidak ada perubahan signifikan. Target harus tercapai, kalau enggak, wanstasi," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Kamis, 16 April 2015 -

Hal : 2.



SENGKARUT RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA

<p>27 Desember 2010</p> <p>Gubernur Bali Mangku Pastika mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.570/1665/BPM, tentang penghentian sementara (moratorium) pembangunan hotel di Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. SE ini diterapkan sejak awal Februari 2011.</p>	<p>27 Juli 2011</p> <p>Presiden SBY menerbitkan Perpres 45/2011 tentang rencana tata ruang Kawasan Perkotaan, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Dalam Perpres itu disebutkan bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi.</p>	<p>26 Desember 2012</p> <p>Gubernur Bali Mangku Pastika menerbitkan SK Nomor 2138/02-CL/H-K/2012 tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa.</p>
---	---	--

 <p>26 Juni 2013</p> <p>Bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo (CR7) secara resmi dinobatkan sebagai duta Forum Peduli Mangrove Bali di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangkaian acara <i>Save Mangrove, Save Earth</i> tahun 2013 di Tanjung Benoa, Badung, Bali.</p>	 <p>16 Agustus 2013</p> <p>Seiring kedatangan CR7 ke Bali mulai berembus kabar bahwa akan ada proyek besar yang memanfaatkan Teluk Benoa. Salah satu bukti yang ditunjukkan yakni adanya sejumlah "taper" di jalan tol. Akhirnya SK Gubernur itu mendapat penolakan masyarakat. Mereka turun ke jalan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.</p>	<p>16 Agustus 2013</p> <p>Gubernur Pastika mencabut SK Gubernur Bali Nomor 2138/02-C/H-K/2012 dan menerbitkan SK Nomor 1727/01-B/H-K/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa.</p>
---	--	---

27 Agustus 2013

Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana (Unud) menyatakan rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak dilakukan.

30 Mei 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Perpres No.51 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres No.45 Tahun 2011 (Perpres Sarbagita). Peraturan tersebut telah ditetapkan Presiden SBY pada 30 Mei 2014 serta diundangkan dan berlaku mulai 3 Juni 2014. Intinya adalah kawasan Teluk Benoa dan Pulau Pudut dicoret dari kawasan konservasi dan diganti sebagai kawasan penyangga.

15 Agustus 2014

Ratusan warga dan pekerja wisata air yang tergabung dalam ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) berkhoyoi dengan perahu saat unjuk rasa di Teluk Benoa, Badung. Mereka menuntut Presiden SBY mencabut Perpres No.51/2014.

13 April 2015

PT-TWBI menyatakan keberatan bila rencana ini ditolak. Selain itu PT TWBI juga telah mengeluarkan dana Rp 1 triliun yang di antaranya digunakan untuk program CSR.

15 April 2015

Tokoh masyarakat Bali meminta pada PT TWBI untuk membuka secara transparan aliran dana sebesar Rp 1 triliun tersebut.

grafis:asd/BaliPost - sumber: Pusat data/diolah dari berbagai sumber



Soal Dana TWBI Rp 1 Triliun

KPK Mesti Telusuri

PUBLIK di Bali makin bertanya-tanya ke mana saja aliran dana Rp 1 triliun yang telah dihabiskan investor PT TWBI terkait rencana reklamasi Teluk Benoa. Dugaan adanya aliran dana ilegal ke pihak tertentu di Bali untuk memuluskan reklamasi ini pun makin menguat.

Anggota Komisi I DPRD Bali yang membidangi hukum dan pemerintahan Nyoman Tirtawan mengaku belum puas dengan pernyataan pihak TWBI terkait aliran dana Rp 1 triliun tersebut. Ia mendesak aparat penegak hukum

di Bali seperti kejaksaan dan KPK di pusat menelusuri aliran dana itu. Sebab, kuat dugaan ada aliran dana ilegal untuk memuluskan rencana reklamasi. "Untuk sebuah kebaikan dan supremasi hukum, aparat penegak hukum di Bali bahkan KPK mesti menelusuri ke mana saja aliran dana Rp 1 triliun yang telah dihabiskan investor. Pihak investor juga mesti terbuka, jangan sembunyi-sembunyi," kata Tirtawan, Rabu (15/4) kemarin.

Hal. 23

Proses Perizinan

Proses Perizinan

Dari Hal. 1

Ia pun memandang wajar kuat dugaan publik ada kongkalikong atau permainan dalam proses perizinan reklamasi ini, sebab memang dari awalnya prosesnya tidak transparan dan akuntabel. "Sekarang aparat penegak hukum, jaksa, KPK bagaimana melihat kasus ini. Kami di Dewan hanya bisa mendorong agar ada pengawasan bersama dan kasus ini dibuka gamblang. Investor juga jangan asal klaim," tegas politisi asal Bebetin, Sawan, Buleleng itu.

Ia juga mendorong agar ada keadilan dalam keran investasi di Bali Selatan dan aturan yang ada ditegakkan. Misalnya ketika sudah ada surat edaran Gubernur terkait moratorium pembangunan akomodasi pariwisata di Bali Selatan, maka itu harus dijalankan pemerintah dan ditaati investor. "Cukup sudah Bali Selatan dijejali akomodasi pariwisata. Mari

berpikir pemerataan pembangunan ke Bali Utara dan Bali Timur," pungkas Tirtawan.

Pengamat ekonomi dan pemerintahan Viraguna Bagoes Oka mengatakan, pemimpin di Bali seharusnya memahami baik dari aspek *sekala* dan *niskala* bahwa proyek reklamasi yang sarat dengan kepentingan bisnis ini memiliki ancaman besar terhadap alam dan masyarakat Bali ke depan.

Baginya, reklamasi bukan jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, reklamasi bukan jalan keluar untuk menjaga lingkungan, reklamasi bukan pula sebagai jalan keluar untuk memajukan pariwisata. Justru penataan yang mengembalikan wajah Bali dengan budaya yang didasari agama, sangat diperlukan saat ini. Baik itu untuk kesejahteraan rakyat, untuk lingkungan dan ajegnya agama yang menjadi tuntunan hidup masyarakat. (kmb29)

Edisi : Kamis, 16 April 2015.

Hal : 1 dan 23.



Terkait Penyerahan Terminal Ubung dan Kargo

Pemkot Denpasar Diminta Cermat Lakukan Kajian

Denpasar (Bali Post) -

Pemkot Denpasar diminta cermat menyusun kajian atas rencana pengalihan kewenangan pengelolaan Terminal Ubung dan Terminal Kargo. Aset-aset penting tersebut jangan terkesan asal diserahkan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya. "Pemkot harus sigap. Rencana pengalihan pengelolaan itu harus benar-benar dikaji dengan cermat. Jangan sampai, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Wakil Ketua DPRD Denpasar Wayan Mariyana Wandhira, Rabu (15/4) kemarin.

Menurut Wandhira, dalam proses pengalihan kewenangan itu nantinya sudah barang tentu akan ada suatu perjanjian atau MoU antara pihak-pihak terkait. Dalam proses inilah pihaknya berharap ada bentuk kerja sama yang tetap melibatkan Pemkot Denpasar di dalamnya, termasuk kontribusi yang bisa didapat Denpasar. Mengingat, Terminal Ubung dan Terminal Kargo berlokasi di wilayah Kota Denpasar.

"Ketika aset tidak lagi jadi milik dan dikelola Pemkot Denpasar tetapi lokasinya ada di Denpasar, harus dikaji, apa yang bisa masuk ke Denpasar. Apakah itu retribusi atau kerja sama. Ada tidak di aturan itu yang memungkinkan adanya kerja sama. Jadi, Pemkot jangan asal serahkan

tanpa ada kajian soal itu nanti," tegasnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah mengkaji dampak pengalihan kewenangan tersebut atas layanan terminal. Pihaknya mengaku khawatir jika berbagai persoalan yang muncul nanti terkait layanan terminal tidak bisa direspons dengan cepat. Contohnya masalah infrastruktur berupa jalan. Ketika jalan provinsi atau jalan nasional rusak, penanganannya terkesan lamban. "Tidak hanya soal aset dan pendapatan, dampak ke pelayanan sudah tentu pasti ada. Makanya, Pemkot harus mengkaji secara keseluruhan dampaknya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Terminal Ubung dan Terminal Kargo bakal dikelola masing-masing oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ini merupakan konsekuensi dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I Gde Astika, Selasa (14/4) mengungkapkan, penyerahan kedua aset tersebut akan dilaksanakan tahun 2016 mendatang. Saat ini, pengalihan kewenangan pengelolaan terminal masih dalam proses sosialisasi dari pemerintah pusat. Itu berarti, masih ada waktu kurang dari setahun bagi Pemkot Denpasar untuk bersiap-siap sebelum peralihan itu terjadi. (kmb25)